
Realisasi Perjanjian Perdamaian Doha Dialogue Antara Afghanistan-Amerika Serikat dan Taliban Periode Kepemimpinan Ashraf Ghani

¹Ali Zhafir Talmullah, ²Mansur, ³Dairatul Ma'arif, ⁴Asep Kamaluddin Nasir
¹²³⁴Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta

Email: aligt@upnvj.ac.id

Abstract: *The long conflict that occurred in Afghanistan resulted in many casualties and setbacks in the field of peace. The events that took place on the land were the aftermath of foreign occupations under the pretext of promoting the progress and prosperity of the Afghan state. The difference in peaceful views between the United States and the Afghan government is different from the Taliban, so the three parties do not stop carrying out attacks. The United States and the Government of Afghanistan consider that the definition of peace is a situation in which extremist groups including the Taliban no longer exist in Afghanistan, while the Taliban considers that peace can be achieved if Afghanistan can stand alone without any intervention from foreign countries. As a result, the peace process is often hampered due to the strong differences between the parties. The author will use the concepts of conflict resolution and cooperation to analyze the peace process in Afghanistan. Descriptive qualitative research method is used to explore more deeply how the realization of the Doha Agreement is implemented. It is the urgency of humanity that makes the author interested in discussing research on the Doha Agreement.*

Keywords: *Conflict, Doha Agreement, United States of America, Government of Afghanistan, Taliban.*

Abstrak: Konflik panjang yang terjadi di Afghanistan mengakibatkan banyaknya korban dan kemunduran di bidang perdamaian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanah tersebut merupakan buntut dari pendudukan negara asing dengan dalih mendorong kemajuan dan kemakmuran negara Afghanistan. Perbedaan pandangan damai antara Amerika Serikat dan Pemerintah Afghanistan berbeda dengan Taliban, sehingga ketiga pihak tidak berhenti melakukan serangan-serangan. Amerika Serikat dan Pemerintah Afghanistan menganggap bahwa definisi damai merupakan situasi di mana kelompok ekstremis termasuk Taliban tidak ada lagi di Afghanistan, sedangkan Taliban menganggap bahwa perdamaian dapat terwujud apabila Afghanistan dapat berdiri sendiri tanpa adanya intervensi negara-negara asing. Akibatnya, proses perdamaian seringkali terhambat dikarenakan perbedaan yang begitu kuat antar pihak. Penulis akan menggunakan konsep resolusi konflik dan kerja sama untuk menganalisa mengenai proses perdamaian di tanah Afghanistan. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mengeksplor lebih dalam bagaimana realisasi Perjanjian Doha dalam pelaksanaannya. Urgensi dari kemanusiaan yang membuat penulis tertarik untuk membahas penelitian tentang Perjanjian Doha.

Keywords : *Konflik, Perjanjian Doha, Amerika Serikat, Pemerintah Afghanistan, Taliban.*

PENDAHULUAN

Perihal gerakan Taliban yang hadir di Afghanistan mengakibatkan lahirnya kelompok-kelompok sayap lain di negara-negara lain. Efek domino dari lahirnya kelompok tersebut memicu perkembangan kelompok islam lainnya di negara-negara yang memiliki populasi islam terbesar maupun negara-negara yang berada di Timur Tengah. Namun, Pemerintah Afghanistan selalu berupaya menahan bahkan menangkis gerakan tersebut dengan operasi militer, sehingga banyak korban berjatuh, baik dari tentara Afghanistan maupun kelompok militant Taliban.

Keberadaan Taliban mulai dikenal sejak tahun 1989, di mana pertempuran dengan Rusia telah usai. Namun, pada masa tersebut, krisis semakin tinggi dengan runtuhnya pemerintahan Najbullah serta meningkatnya konflik antara mujahidin dan kelompok lainnya. Perpecahan tersebut berbuntut hingga pada akhirnya, Taliban menguasai kursi pemerintahan di Afghanistan pada tahun 1996. Popularitas Taliban mulai meningkat di wilayah Kandahar dengan membangun kekuatan melalui diplomasi kepada pimpinan wilayah tersebut. Upaya tersebut dilakukan oleh Taliban untuk mendapatkan legitimasi lokal secara cepat dengan tujuan merebut kekuasaan di wilayah Kabul saat itu. Tindakan yang dilakukan oleh Taliban dimulai dengan menguasai wilayah Kandahar sebagai bentuk pengumpulan kekuatan sebelum memasuki kota besar. (Weigand, 2017).

Hal diatas merupakan faktor yang memberikan pengaruh tentang bagaimana berbagai pihak menyelesaikan masalah di Afghanistan karena periode merdeka Taliban dapat dikatakan belum cukup panjang terhitung sejak kemerdekaan dari pemerintah Rusia. Dalam upaya mempengaruhi diplomasi global, setiap pihak memiliki tujuan untuk menjalankan pengaruhnya dengan menjalin hubungan diplomasi baik dengan negara-negara di skala internasional, dengan tujuan mengajak dan atau untuk menggerakkan negara lain untuk menjalankan tugas dan

fungsinya sesuai dengan napa yang sudah direncanakan. (Margono, 2015) dengan tujuan tersebut, seluruh aktor yang bergerak dalam kontribusi kemerdekaan Afghanistan akan bersaing secara global untuk mendapatkan legitimasi dari seluruh masyarakat global dalam upaya perbaikan yang dituju.

Peristiwa lain yang menjadi upaya Taliban dalam menduduki wilayah-wilayah di negara Afghanistan yaitu dengan melakukan penyerangan ke sebagian wilayah utara Afghanistan meskipun berhasil ditangkis oleh Pemerintah Afghanistan melalui serangan udara. Pemerintah Afghanistan melakukan penyerangan di empat titik dan mengakibatkan tewasnya banyak orang di Provinsi Takhar, tepatnya di Kota Taluqan. (Jaramaya, 2021)

Atas dasar kurangnya pendukung dari Pemerintah Afghanistan saat itu, kemenangan dicapai oleh Taliban. Penulis merasa bahwa perjanjian yang dihasilkan berdasarkan pertemuan di Doha memiliki keberpihakan terhadap kelompok Taliban. Hal tersebut dapat dilihat dari isi yang telah disepakati oleh ketiga pihak hingga akhirnya Amerika Serikat menarik mundur sebagian pasukannya. Selain itu, sebagian pejabat di Afghanistan juga melarikan diri dari negaranya dengan alasan tidak ingin ada pertumpahan darah dari konflik panjang yang terjadi.

TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang resolusi konflik dalam menyelesaikan masalah di Afghanistan, Khurun'in menjelaskan mengenai gagalnya upaya damai di Afghanistan, namun jurnal tersebut tidak menjelaskan upayanya secara eksplisit. Hanya menjelaskan faktornya saja namun belum menjelaskan cara untuk menyelesaikan. (Khourun'in, 2017) Jurnal lainnya juga membahas mengenai perdamaian di afghanistan (Sugara, 2021) yang mengatakan

bahwa, proses perdamaian di Afganistan tidak dapat diselesaikan oleh PBB maupun negara lainnya.

Menurut (Ariastuti, 2020) dalam jurnalnya, langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat serta sekutunya masih dapat dikatakan represif, hal tersebut dilakukan dengan alasan menangani kelompok-kelompok pemberontak. Sedangkan jurnal yang ditulis oleh Claytho Thomas membahas tentang perdamaian melalui *Doha Dialogue* yang dilakukan pada September 2020. Namun, jurnal tersebut belum membahas tentang kegagalan dari pertemuan tersebut secara menyeluruh serta keberpihakan dari pertemuan serta perjanjian yang disepakati. Dalam Jurnal tersebut juga tidak membahas tentang bagaimana penyelesaian konflik atau rekomendasi agar perjanjian tersebut berjalan dengan baik. (Thomas, 2021).

Maka, ketika membahas mengenai *Doha Dialogue* penulis merasa bahwa pertemuan tersebut menjadi pertemuan awal dari proses diplomasi, dalam upaya penegakkan perdamaian secara damai dan tidak menggunakan kekerasan.

METODOLOGI DAN KONSEP

Pendekatan kualitatif dirasa cukup mampu untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait bagaimana realisasi dari Perjanjian Doha, hal tersebut dikarenakan setiap masalah akan dibahas melalui studi pustaka dan mengamati pola-pola konflik terdahulu melalui sumber-sumber akurat. Sumber tersebut diantaranya beberapa jurnal, buku maupun bahan-bahan lainnya yang pernah membahas mengenai konflik di Afghanistan serta upaya meredakan konflik tersebut. Penulis juga membutuhkan pendekatan kualitatif karena langkah-langkah yang dimiliki yaitu mengandalkan data teks, gambar serta eksplorasi melalui pemahaman isu secara mendalam. (Creswell & Creswell, 2018).

Sedangkan konsep yang digunakan oleh penulis mencakup dua aspek yaitu, Kerjasama dan resolusi konflik. Kedua konsep tersebut akan menjawab mengenai

sejauh mana kontribusi ketiga pihak dalam mewujudkan perdamaian di Afghanistan dan bagaimana resolusi konflik tersebut dilakukan. Karena, konflik yang terjadi di Afghanistan cukup panjang, maka perlu upaya serius untuk melibatkan beberapa aktor dalam menyelesaikannya.

Konsep Kerjasama merupakan sebuah konsep dengan upaya mencapai tujuan bersama dan untuk menyelesaikan konflik maupun perselisihan dengan tidak menggunakan kekerasan. Tujuan lain dari konsep ini yaitu mencapai keamanan serta perdamaian berskala internasional. Konsep Kerjasama merupakan konsep yang biasa digunakan untuk menganalisa beberapa permasalahan dan untuk meninjau sejauh mana perbedaan yang ada, meskipun di dunia banyak Kerjasama yang gagal karena perbedaan tujuan dan kepentingan. Kerjasama menurut James M. Scott memiliki berbagai manfaat dalam mendorong perdamaian apabila dilakukan dengan baik. Dampak dari konsep tersebut adalah dengan menghasilkan kemakmuran, menjaga sumber daya serta mampu menegakkan keadilan untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan solusi atas permasalahan yang terjadi. (M. Scott, G. Carther, & Cooper Drury, 2019)

Sedangkan konsep resolusi konflik merupakan konsep yang membahas tentang pengaturan norma untuk mengatur intermediasi, internasionalisasi, kepastian serta untuk membangun masyarakat. Resolusi konflik juga merupakan strategi setiap negara untuk membuat norma yang mengatur mengenai kemajuan dan pembangunan masyarakatnya. Resolusi konflik juga digunakan untuk menekankan peraturan norma yang berguna untuk menyadarkan perilaku negara yang ada di wilayah tertentu tentang identitas dari negara tersebut. Upaya tersebut membantu organisasi regional untuk

mengatur serta mengetahui perilaku dari negara-negara yang berdiri di wilayahnya. (Prakoso Aji & Indrawan, 2019)

Menurut Jacob Bercovitch dalam bukunya mengatakan bahwa resolusi konflik merupakan sebuah metode untuk menaikkan kapasitas masyarakat untuk mengetahui serta memahami tentang bagaimana konflik terjadi. Tak hanya itu, konsep ini juga berupaya untuk mengurangi konflik dan mengurangi kekerasan yang ada. Upaya tersebut sejalan dengan konsep Kerjasama dengan melibatkan proses politik yang ditingkatkan untuk penyesuaian kepentingan. (Berkovitch, Kremenyuk, & Zartman, 2008). Selain itu, Resolusi konflik juga disebut oleh Louis Kriesberg sebagai apapun yang dapat terjadi dalam dimensi apapun termasuk organisasi, keluarga maupun negara. Sedangkan Johan Galtung mengatakan bahwa resolusi konflik merupakan sebuah cara maupun strategi untuk mengupayakan perdamaian. Beberapa metode di atas diharapkan mampu menjawab analisa dari realisasi Perjanjian Doha serta dampaknya terhadap perdamaian di Afghanistan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Pertemuan Doha merupakan pertemuan besar yang pertama kali melibatkan ketiga pihak yaitu, Amerika Serikat, Afghanistan dan Taliban dalam satu bingkai yang sama. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Doha Qatar pada bulan Februari 2020. Tidak hanya itu, pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa negara termasuk Indonesia di dalamnya. Pembahasan tersebut tidak luput dari perdamaian di Afghanistan serta masa depan Afghanistan yang sampai saat ini belum terwujud. Penarikan pasukan yang dilakukan oleh Amerika Serikat merupakan upaya dari kesepakatan Perjanjian Doha.

Pemerintah Amerika Serikat menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan perdamaian di negara tersebut dengan penarikan pasukan Amerika Serikat dan Internasional dari tanah

tersebut, dengan jaminan bahwa Taliban berhenti melakukan rekrutmen dan mencegah aliran lain seperti Al-Qaeda untuk dapat menyebarluaskan pengaruhnya. Taliban harus mencegah aliran tersebut karena dapat mengancam Amerika dan sekutunya. (Thomas, 2021)

Pemerintah Qatar mengharapkan hasil yang maksimal dari pertemuan Doha dengan kemajuan perdamaian yang baik. Pertemuan tersebut di dorong atas dasar urgensi perdamaian di negara Afghanistan dengan melibatkan perempuan, masyarakat sipil dan juga mempertemukan perwakilan Taliban dan Pemerintah Afghanistan. Menurut Doha, pertemuan ini merupakan inisiatif terbaik untuk memecah kebuntuan komunikasi antar pihak yang bertikai. (Idris, 2019)

Namun, hasil riset melalui wawancara dengan Dr. Abdul Muta'ali mengatakan bahwa pertemuan ini di dorong oleh negara-negara yang terdampak akibat migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh negara tetangga sekitar Afghanistan. Dorongan tersebut hadir untuk mengakhiri perang dan isu kemanusiaan yang krisis akibat konflik panjang yang terjadi di Afghanistan. Masing-masing menampung sekitar 5 juta pengungsi di Pakistan dan Turki sebanyak 3 juta pengungsi. Tidak hanya dari isu migrasi, namun laporan secara massif juga dilakukan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees*.

Menurutnya, Doha menjadi pusat yang menghasilkan lembaga-lembaga serta orang-orang unggulan yang dapat mempromosikan kelompok-kelompok yang dianggap termarginalkan. Berdasarkan temuan yang didapatkan oleh narasumber, Doha selalu dijadikan fasilitator untuk mempromosikan islam yang tidak terkesan ekstrem dan humanis. Dengan beberapa kelompok yang telah diperkenalkan oleh Doha yaitu, Hamas dan Ikhwanul Muslimin. Kedua

kelompok tersebut dianggap sebagai kelompok yang tidak hanya berbicara mengenai halal dan haram, lebih daripada itu mereka juga sangat progresif dalam membangun kemajuan organisasi. Sedangkan Taliban, diperkenalkan dengan wajah baru yang lebih humanis dengan menghormati perempuan dan menghargai lingkungan sekitar.

Berdasarkan wawancara, Taliban telah berhasil meningkatkan legitimasi dan merebut kepercayaan di Afghanistan sejak perjanjian tersebut disepakati. Ada beberapa keberhasilan yang dicapai oleh Taliban yaitu, Taliban mampu membuka lembaran baru dengan wajah baru untuk bertransformasi menjadi lebih baik serta merekonstruksi ulang sistem pemerintahan yang mereka wacanakan sebelumnya. Selanjutnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh Taliban yaitu dengan menghormati perempuan dan hak-hak manusia lainnya serta menjadi lebih humanis. Sebagai contoh yaitu, pemberian izin kepada perempuan untuk bersekolah serta akses-akses lainnya yang mereka bandingkan dengan negara lain. Terakhir yaitu, Taliban mampu bekerja untuk rakyat di wilayah yang tidak sering dijangkau oleh pemerintah dibanding pemerintah Ashraf Ghani itu sendiri. Qatar dapat dikatakan sebagai *role model* dari Taliban dalam memperkenalkan islam secara baik dan humanis.

Hal diatas diakibatkan oleh Amerika Serikat yang dirasa belum fokus pada pembangunan negara sehingga masyarakat memiliki rasa ketidakpercayaan terhadap pihak asing. Namun, momentum tersebut dijadikan sebagai peluang bagi Taliban untuk meningkatkan legitimasinya di masyarakat dengan melakukan pembangunan. Kekosongan yang terjadi akibat ketidakpercayaan terhadap pihak asing dilakukan oleh Taliban melalui pembangunan jembatan, klinik, hingga sekolah-sekolah gratis. Beberapa proyek yang juga tidak diberikan oleh pihak asing ialah sumur-sumur sumber air bersih. Pada akhirnya, Taliban berhasil memojokkan AS dengan dihadapkan

dengan beberapa isu yaitu laut cina dan pemberontakan Taliban di Afghanistan sehingga AS harus memikirkan kembali biaya yang dikeluarkan.

Singkatnya, Perjanjian Doha melibatkan berbagai negara dunia yang terkena dampak dari pengungsi Afghanistan yang melakukan migrasi ke negara lain. Permasalahan pengungsi menjadi masalah utama khususnya bagi negara-negara berkembang yang masih belum cukup mampu untuk membiayai keperluan masyarakatnya sendiri. Selanjutnya, dorongan dari Uni Eropa untuk mengakhiri perang ini yang diakibatkan oleh urgensi kemanusiaan di Afghanistan yang di bantu oleh Inggris dan New Zealand. Terakhir, dikarenakan koalisi AS yaitu Inggris memiliki utang terhadap Doha, hal tersebut menjadi nilai tawar bagi Doha untuk mengakhiri perang panjang di Afghanistan. Amerika Serikat juga tidak meninjau kembali tentang masalah kemanusiaan yang mengakibatkan Uni Soviet mundur dari Afghanistan dengan salah satu alasan yaitu pembiayaan. Amerika Serikat hanya fokus pada pendanaan kepada pemerintah Ashraf Ghani yang pada akhirnya hanya digunakan untuk keperluan perang.

Tantangan, Hambatan dan Upaya Pemerintah Afghanistan

Pemerintahan yang berdiri di bawah tampuk kekuasaan Ashraf Ghani memiliki dinamika dan jalan panjang untuk mendorong perdamaian di Afghanistan. Sehingga presiden harus melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan bangsanya. Era kepemimpinan Ashraf Ghani memiliki jalan panjang karena tidak terlepas dari banyaknya konflik yang terjadi di masyarakat. Bagi beberapa kelompok, Ashraf Ghani memiliki pandangan yang kurang baik dalam menanggapi isu yang terjadi di masyarakat karena tempramen yang tinggi serta implementasi perdamaian yang dinilai

masih sedikit perkembangannya. (Bimo, 2021)

Salah satu kelompok yang menjadi tantangan bagi Pemerintah Afghanistan ialah Taliban, yang mana kelompok Taliban memiliki legitimasi besar dan dapat menghimpun kekuatan dari rakyat. Taliban dianggap sebagai pemberontak bagi pemerintah karena selalu melakukan gerakan-gerakan inkonstitusional dan gerilya untuk melawan pemerintah serta pasukan-pasukan asing. Kewaspadaan yang dimunculkan oleh pemerintah diakibatkan juga oleh kekhawatiran bahwa kelompok tersebut akan melakukan kudeta serta mengambil alih tampuk kekuasaan. Serta kudeta yang dilakukan tak hanya menurunkan presiden namun mengganti kebijakan-kebijakan yang dianggap sekuler serta menyimpang dari ajaran-ajaran islam.

Selain itu, tantangan dan hambatan yang terjadi di era kepemimpinan Ashraf Ghani diakibatkan oleh desakan-desakan dari masyarakat kepada pemerintah untuk memenuhi janji-janji kampanyenya yang belum terlaksana. Beberapa hal yang dituntut oleh berbagai pihak termasuk Taliban yaitu, melakukan perang terhadap tindak korupsi yang massif di pemerintahan era Ashraf. Selanjutnya yaitu melakukan pemulihan ekonomi serta melakukan pembenahan ekonomi yang rusak di Afghanistan. Hal lain yang dituntut oleh masyarakat dan pihak oposisi yaitu menjadikan Afghanistan sebagai penghubung bagi kerja sama antara Asia Tengah dan Selatan. (Santoso, 2021)

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Afghanistan dalam mendorong perdamaian di Afghanistan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak asing untuk menjaga stabilitas politik yang ada di negaranya. Pasukan yang dilibatkan dalam mendorong perdamaian yaitu berasal dari NATO maupun Amerika Serikat. Kebijakan yang dikenal sebagai counterterrorism merupakan upaya untuk menangkal tindakan terorisme yang terjadi di Afghanistan dengan melakukan

kontak senjata. Keputusan untuk melakukan kontraterorsime digunakan untuk melwan serta menangkal aksi terror yang diciptakan oleh kelompok-kelompok oposisi. Hal tersebut juga digunakan untuk merespon peristiwa pengeboman di Kabul yang mana, pada peristiwa tersebut mengakibatkan tewasnya 63 orang. (BBC, 2019).

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Ashraf Ghani ialah dengan melakukan diskusi mengenai kontraterorsime bersama dengan INTERPOL. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa tokoh-tokoh penting beserta jajaran kepolisian untuk menyusun strategi serta identifikasi bidang-bidang yang nantinya akan di dukung oleh pihak INTERPOL. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah dengan INTERPOL merupakan upaya untuk menangkal gerakan terorisme di wilayah Afghanistan dan sekitarnya. Penangkalan tersebut tidak hanya dari dimensi terorisme namun, dari permasalahan narkoba maupun tindakan kriminal lainnya. INTERPOL dijadikan mitra oleh pemerintah Ashraf Ghani untuk turun ke lapangan dengan beberapa strategi khusus dalam menyelesaikan masalah. INTERPOL juga dijadikan mitra untuk memperluas jaringan serta memudahkan penangkapan terhadap pemetaan terorisme serta tindak kriminal lainnya. (INTERPOL, 2019)

Kontraterorisme dijalankan dengan beberapa cara yaitu, dengan menggunakan biometric data dalam menjaga keamanan negara. Biometrik Data merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk menentukan karakteristik manusia secara digital dengan akses ke sistem. Pengenalan tersebut juga dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan anggota tubuh seperti sidik jari, wajah serta retina mata. (Palimbani, 2020) dengan cara tersebut, INTERPOL menggunakan pendataan jaringan teroris untuk melakukan kerjasama. Hal tersebut

juga digunakan untuk pelacakan serta melakukan verifikasi dari target yang berkaitan. Selain itu, program yang diusung oleh INTERPOL juga tak hanya fokus terhadap kejahatan terorisme melainkan tindak kriminal lain seperti perdagangan barang ilegal dan uang yang berasal dari hasil kejahatan (INTERPOL, 2019)

Berdasarkan konsep resolusi konflik, upaya resolusi konflik harus dibarengi dengan proses politik sehingga, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah merupakan langkah yang sesuai dengan konsep yang penulis bawa. Resolusi konflik juga sesuai dengan Perjanjian Doha dan langkah lain guna menyelaraskan kepentingan serta mengurangi kekerasan. Kontraterorisme merupakan tindakan yang masih menggunakan kekerasan sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan konsep yang di usung oleh Berkovitch. (Berkovitch, Kremenyuk, & Zartman, 2008) Sehingga, kontraterorisme masih belum cukup maksimal dilakukan oleh pemerintah Ashraf Ghani.

Setelah melakukan banyak upaya dalam menjamin keamanan dan perdamaian di Afghanistan, presiden Ashraf Ghani bersama-sama memutuskan untuk menggagas perjanjian damai melalui negosiasi politik dengan beberapa pihak. Pada akhirnya, Ashraf Ghani sepakat meskipun sebelumnya Pemerintah Afghanistan tidak setuju dengan Perjanjian Doha. Sebab, baginya perjanjian tersebut tidak sesuai dengan upaya pemberantasan terorisme, selain itu karena sebagian masyarakat Afghanistan merasa belum seutuhnya siap untuk menjalani kehidupannya tanpa bantuan asing dan kekhawatiran terbesar adalah perjanjian tersebut memberikan peluang terhadap kelompok terorisme untuk dapat berkembang kembali di tanah Afghanistan. (Machmudi, Noor, Ghafur, & dkk, 2021)

Pemerintah Afghanistan mengatakann bahwa pemilu pada fase saat ini harus diawasi oleh pengawasan internasional dan untuk segera

mengakhiri perang panjang menuju proses damai. Adapun hal tersebut dilakukan melalui rekonsiliasi nasional maupun reintegrasi pejuang dan pengungsi serta memberikan prioritas keamanan dan pembangunan. Meskipun AS maupun pihak asing lainnya telah keluar dari tanah Afghanistan, namun salah satu pakar Asia mengatakan bahwa Afghanistan masih belum dapat melakukan konsesnsus dengan kelompok-kelompok yang ada di negara tersebut. (Gozali, 2018)

Isi Perjanjian Doha Amerika Serikat-Afghanistan dan Taliban serta Realisasinya

Perjanjian Doha membahas mengenai jaminan keamanan yang akan diberikan oleh ketiga pihak. Perjanjian ini juga berbicara tentang upaya koalisi yang dilakukan antara Afghanistan dengan Amerika Serikat. Dalam perjanjian ini, Afghanistan dianggap sebagai negara sah di bawah hukum internasional sedangkan Amerika Serikat dianggap memiliki komitmen terhadap perdamaian yang ada di Afghanistan sebagai wujud nyata sebagai negara yang berkontribusi dalam stabilitas secara global. Perjanjian tersebut dilakukan guna mengakhiri perang panjang secara komperhensif dan berkelanjutan.

Perjanjian Doha dinilai tidak menguntungkan pihak Afghanistan dari segi politik. Peluang ini dimanfaatkan oleh pihak Taliban untuk mengambil alih legitimasi di Afghanistan. Proses panjang dari hasil pertemuan doha sehingga menghasilkan Perjanjian Doha menguntungkan pihak Taliban dengan poin yang termaktub berkaitan dengan mundurnya pasukan Amerika Serikat dari tanah tersebut. Kesendirian pasukan Afghanistan menurunkan posisi tawar pemerintah Ashraf Ghani karena sedikitnya jumlah pasukan dan mundurnya pasukan asing. Poin yang bertolak belakang dari perjanjian yaitu, komitmen Amerika

Serikat dengan Pemerintah Afghanistan untuk memberikan dukungan keamanan. Namun, menurut Joe Biden, pemerintah AS telah mengeluarkan banyak dana untuk membantu Afghanistan dalam menangani konflik sehingga, Joe Biden memutuskan untuk mundur dari pertempuran. Hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan AS, mengeluarkan biaya, tetapi tidak berpengaruh terhadap pembangunan yang ada di Afghanistan, melainkan dana tersebut hanya berpengaruh pada proyek perang. (Saleh, 2021)

Di sisi lain, AS membantu Afghanistan dalam pencegahan terorisme yaitu dengan melakukan dialog dengan Taliban. Tetapi, dialog tersebut menghasilkan beberapa poin penting yang tidak memihak terhadap keamanan di Afghanistan yaitu mundurnya Amerika Serikat dari tanah Afghanistan. Padahal, dalam perjanjian menyebutkan bahwa Afghanistan akan dibantu oleh AS atas dasar keinginannya melalui bantuan dana. Faktor tersebut di dukung oleh partisipasi perempuan serta masyarakat Afghanistan. (Gunerigok, 2021)

Selain itu, perjanjian tidak hanya dilakukan oleh AS dengan Afghanistan saja. Tetapi, kelompok Taliban juga turut dilibatkan dalam perjanjian. Perjanjian tersebut meliputi jaminan keamanan yang akan diberikan oleh AS maupun Taliban dalam mewujudkan keamanan dari kedua pihak serta mewujudkan perdamaian di negara Afghanistan. Dalam perjanjian termaktub bahwa Amerika Serikat meminta kepada Taliban agar tidak melakukan rekrutisasi terhadap gerakan-gerakan terorisme. Gerakan tersebut meliputi Al-Qaida, ISIS-K serta kelompok-kelompok teroris lainnya.

Upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Taliban merupakan buntut dari kekuatan yang seimbang antara kedua pihak. Amerika Serikat dari sisi teknologi yang dimiliki serta Taliban dari segi konsistensi untuk melakukan perlawanan secara terus-menerus. AS melakukan upaya-upaya

tersebut atas dasar sokongan kuat yang berasal dari Pemerintah Afghanistan. Dilain sisi, Taliban memiliki legitimasi serta kekuatan besar yang dihimpun sejak lama dan dilakukan secara massif.

Realisasi dari perjanjian tersebut berakibat pada peluang kemenangan bagi Taliban yang diakibatkan oleh mundurnya pasukan Amerika Serikat dalam pertempuran melawan kelompok Taliban, sehingga pemerintah Ashraf Ghani hanya beridiri sendiri tanpa bantuan asing. Hal tersebut terjadi karena keberadaan Amerika Serikat selalu dijadikan alasan sebagai mula dari peperangan yang terjadi untuk melawan pemerintah Ashraf Ghani. (Machmudi, Noor, Ghafur, & dkk, 2021)

Perjanjian Doha juga memiliki kontribusi untuk menaikkan posisi tawar Taliban terhadap urusan diplomatik di Afghanistan. Namun, menurut Taliban, perbincangan yang di gagas oleh Ashraf Ghani tidak mendorong kemajuan terhadap perdamaian dan hanya mempengaruhi sedikit dari aspek perdamaian. Perjanjian yang di tanda tangani pada tahun 2020 tersebut dianggap kurang mendorong perdamaian dan selalu mendapatkan hambatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut. (Santoso, 2021)

Realisasi keberpihakan Perjanjian Doha dapat ditinjau melalui mundurnya pasukan asing termasuk AS dari tanah Afghanistan, hal tersebut dijadikan sebagai peluang bagi Taliban untuk menaikan nilai tawar serta legitimasi. Sebab, Perjanjian Doha tidak membahas mengenai keamanan pemerintah Ashraf Ghani, fokus dari perjanjian tersebut hanya pada perlindungan serta jaminan keamanan Pemerintah Afghanistan dan Taliban untuk melindungi Amerika Serikat pada tahap penarikan mundur pasukannya sehingga, hal tersebut menjadi celah bagi Taliban untuk melakukan gerakan yang tidak diatur dalam perjanjian yaitu mejaga

keamanan pemerintah Ashraf Ghani.

Beberapa keuntungan yang berdampak positif bagi Taliban yaitu meluasnya jaringan operasi dan wilayahnya. Dengan tidak adanya aturan jaminan terhadap pemerintah Ashraf Ghani mengakibatkan longgarnya aturan untuk melakukan serangan terhadap pemerintah. Kekalahan juga dirasakan oleh pemerintah Ashraf Ghani karena kekurangan bantuan dari pihak asing, ketergantungan tersebut sangat berdampak negatif terhadap pemerintah. Ingkarnya AS dan sekutunya terlihat dari perjanjian di mana AS akan membantu bersama-sama menyelesaikan isu di Afghanistan namun pada kenyataannya, AS dan sekutunya mundur dengan alasan akan memberikan kesempatan luas kepada Afghanistan untuk merdeka dan mengelola negaranya sendiri.

Akibatnya, Taliban terus-menerus melakukan perlawanan melalui penyerangan terhadap pemerintah karena poin yang tidak termaktub dalam perjanjian mengenai jaminan keamanan. Taliban terus melakukan perluasan wilayah kekuasaan serta jaringannya hingga ke distrik-distrik kecil. Hal lain yang menjadi faktor pendorong Taliban untuk melakukan penyerangan ialah tidak tepatnya waktu yang dijanjikan oleh AS untuk mundur dari tanah Afghanistan sehingga Taliban terus melakukan penyerbuan terhadap pasukan yang masih tersisa. (Gardner, 2021)

Realisasi dari Perjanjian Doha menurut Direktur Kajian Timur Tengah Universitas Indoneisa mengatakan bahwa Perjanjian Doha merupakan suatu momentum dan peluang bagi Taliban untuk dapat mengambil alih tanah Afghanistan, hal tersebut merupakan dampak dari ketergantungan yang tinggi Pemerintah Afghanistan sebelumnya terhadap pasukan asing. Hal tersebut digambarkan dalam perjanjian yang mana perjanjian tersebut mendorong pihak asing untuk meninggalkan tanah Afghanistan.

Kementerian Luar Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri

mengatakan bahwa Perjanjian Doha dapat dikatakan cukup baik dalam pelaksanaannya untuk membuka integrasi serta dialog di negara tersebut. Hasil dari perjanjian tersebut masih memiliki banyak tantangan dan hambatan yang diakibatkan oleh serangan Taliban serta keterlibatan negara asing untuk menghalangi proses perdamaian tersebut.

Maka dari itu, perjanjian yang disahkan pada bulan Februari tahun 2020 ini merupakan awal terjadinya peristiwa besar yang mempertemukan ketiga pihak yang bertikai sekaligus melibatkan pihak non-negara yaitu Taliban sebagai akar dari permasalahan perdamaian di Afghanistan. Realisasi yang terjadi pasca perjanjian tersebut yakni, masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia meskipun perjanjian telah di sahkan. Hingga pada akhirnya presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa pasukan AS akan mundur dari medan tempur konflik untuk memberikan kebebasan serta kedaulatan seutuhnya kepada Pemerintah Afghanistan.

KESIMPULAN

Pertemuan Doha merupakan langkah besar bagi Amerika Serikat, Taliban serta Afghanistan untuk memutus kebuntuan komunikasi yang terjadi sejak lama. Pertemuan tersebut menghasilkan dampak positif bagi perdamaian di Afghanistan melalui perjanjian damai yang di tanda tangani pada tahun 2020 di Qatar. Namun, secara spesifik, perjanjian tersebut masih harus dikaji tentang keberpihakan terhadap satu pihak.

Perjanjian Doha merupakan perjanjian yang melibatkan tiga aktor besar namun, perjanjian tersebut masih perlu evaluasi yang diakibatkan oleh perdamaian yang masih belum tercipta di tanah Afghanistan.

Kemudian, Doha Dialog dalam konsep kerjasama merupakan sebuah upaya nyata dari ketiga pihak untuk sama-sama melakukan negosiasi

terbuka. Negosiasi 78 tersebut dilakukan guna mendorong perdamaian di Afghanistan. Pada bagian awal dijelaskan ada dua pilihan penyelesaian masalah yaitu intermediasi dan internasionalisasi. Penulis berpendapat bahwa masalah ini akan lebih relevan dengan upaya intermediasi. Intermediasi dilakukan dengan mempertemukan Amerika Serikat, Afghanistan dan Taliban pada pertemuan Doha di Qatar pada tahun 2020.

Sejauh perjanjian ini berjalan, penulis berpendapat bahwa perjanjian ini menguntungkan pihak Taliban di tahun 2020-2021. Bahkan, AS dan Taliban sepakat untuk terus menjaga hasil pertemuan tersebut. Komitmen kedua pihak terlihat dari pertemuan AS dan Taliban pada Oktober 2021. Kedua pihak juga bersepakat untuk bersama-sama membahas penanganan tentang kelompok ekstremis dan penjagaan warga AS di Afghanistan. Pertemuan tersebut juga merupakan buntut dari Perjanjian Doha pada tahun 2020 di Qatar. Namun, AS masih belum merilis hasil dari pertemuannya di bulan Oktober, tetapi perwakilan dari AS mengatakan bahwa perjanjian tersebut dilakukan guna mendorong dan mempertahankan Perjanjian Doha. Dorongan tersebut berupa penegasan AS pada janji Taliban untuk menghormati hak-hak perempuan dan menyusun pembentukan pemerintahan yang inklusif serta membuka akses bantuan kemanusiaan.

Pada akhirnya, kesepakatan tersebut di sepakati walaupun dalam segi perdamaian dirasa masih belum memiliki perkembangan yang cukup yang diakibatkan oleh kudeta yang dilakukan terhadap pemerintah Ashraf Ghani.

DAFTAR PUSTAKA

BBC. (2019, Agustus 2021). *Afghanistan: Bomb kills 63 at wedding in Kabul*. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-asia-49383803>

Berkovitch, J., Kremenyuk, V., & Zartman, I. W. (2008). *The SAGE Handbook of Conflict Resolution*. Los Angeles:

SAGE Publications Ltd.

- Bimo, E. S. (2021, Agustus 16). *Profil Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan yang Gagal Pertahankan Negara Lalu Kabur ke Luar Negeri*. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.tv/article/201964/profil-ashraf-ghani-presiden-afghanistan-yang-gagal-pertahankan-negara-lalu-kabur-ke-luar-negeri?page=all>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Gardner, F. (2021, Juli 8). *Afghanistan: Mengapa penarikan pasukan Barat memicu kekhawatiran kembalinya al-Qaeda?* Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57717844>
- Gozali, P. (2018, Maret 5). *Upaya merajut damai di Bumi Afghan*. Retrieved from AA: <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/upaya-merajut-damai-di-bumi-afghan/1079983>
- Gunerigok, S. (2021, Oktober 11). *AS adakan dialog secara "jujur dan profesional" dengan Taliban*. Retrieved from aa.com.tr: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/as-adakan-dialog-secara-jujur-dan-profesional-dengan-Taliban/2388380>
- Idris, U. (2019, Agustus 8). *Dialog perdamaian Afghanistan berlangsung di Qatar*. Retrieved from aa.com.tr: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/dialog-perdamaian-afghanistan-berlangsung-di-Qatar/1525858>
- INTERPOL. (2019, Agustus 29). *Afghan President discusses terrorism and security issues with INTERPOL Chief*. Retrieved from Interpol.int:

- <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2019/Afghan-President-discusses-terrorism-and-security-issues-with-INTERPOL-Chief>
- Jaramaya, R. (2021, July 12). *Pasukan Afghanistan Lumpuhkan Serangan Taliban*. Retrieved from Replubika: <https://www.republika.co.id/berita/qw425s377/pasukan-afghanistan-lumpuhkan-serangan-Taliban>
- M. Scott, J., G. Carther, R., & Cooper Drury, A. (2019). *IR International, Economic, and Human Security in a Changing World Third Edition*. California: SAGE Publications Ltd.
- Machmudi, Y., Noor, F., Ghafur, M. F., & dkk. (2021). *Era Baru Afghanistan Invasi Barat Hingga Kemenangan Taliban*. Depok: Gema Insani.
- Margono. (2015). Aktor Non-Negara Dalam Hubungan Internasional. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 105-110.
- Palimbani, M. A. (2020, Agustus 8). *Polemik Keamanan Data Biometrik*. Retrieved from Gama Cendekia UGM: <https://gc.ukm.ugm.ac.id/2020/08/polemik-keamanan-data-biometrik/>
- Prakoso Aji, M., & Indrawan, J. (2019). Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian Dari Hubungan Internasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 65-83.
- Reditya, T. H. (2021, 08 10). *Profil Pemimpin Dunia Ashraf Ghani Presiden Afghanistan*. Retrieved from <https://www.kompas.com/global/read/2021/08/10/145557670/profil-pemimpin-dunia-ashraf-ghani-presiden-afghanistan?page=all>: <https://www.kompas.com/global/read/2021/08/10/145557670/profil-pemimpin-dunia-ashraf-ghani-presiden-afghanistan?page=all>
- Reditya, T. H. (2021, Agustus 8). *Profil Pemimpin Dunia: Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan*. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.com/global/read/2021/08/10/145557670/profil-pemimpin-dunia-ashraf-ghani-presiden-afghanistan?page=all>
- Saleh, T. (2021, Agustus 22). *AS Hamburkan Rp32.000 T di Afghanistan, Paling Gede buat Ini!* Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210822095338-4-270217/as-hamburkan-rp32000-t-di-afghanistan-paling-gede-buat-ini>
- Santoso, A. (2021, Agustus 16). *Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan yang gagal berdamai dengan Taliban*. Retrieved from Antara News: <https://www.antaranews.com/berita/2329054/ashraf-ghani-presiden-afghanistan-yang-gagal-berdamai-dengan-Taliban>
- Setyo, T. T. (2021, Maret 31). *Presiden Afghanistan Ashraf Ghani Umumkan Tiga Langkah Perdamaian*. Retrieved from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/global/read/4520231/presiden-afghanistan-ashraf-ghani-umumkan-tiga-langkah-perdamaian>
- Thomas, C. (2021). Afghanistan: Background and U.S. Policy: In Brief. *Analyst in Middle Eastern Affairs*, 1-13.
- Weigand, F. (2017). Afghanistan's Taliban – Legitimate Jihadists or Coercive Extremists? *Journal of Intervention and Statebuilding*, 360-381.